YB RUSMANTA RESMI JABAT KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI PAPUA

Jum'at, 16 Desember 2022 - Eki Lutfiliani Ramadhaningtyas

BogoPapua.net JAYAPURA - Dr. Yohanes Baptista Joko Rusmanta, S.Si., M.Si akhirnya resmi menjabat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua periode 2022-2027 menggantikan Iwanggin Sabar Olif, S.H yang telah habis masa jabatannya.

Diawali dengan Penandatanganan Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan yang dilanjutkan dengan penyerahan Memori Jabatan serta Cinderamata.

Acara Sertijab ini dilaksanakan di Gedung Sasana Krida Aula Lukmen Kantor Gubernur Provinsi Papua, Kamis (15/12/2022).

Serah terima jabatan ini disaksikan Wakil Ketua Ombudsman RI Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA.

Turut juga dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Elsye P. Rumbekwan, S.Pi, M.Si, Kabinda Papua Mayjen TNI (Purn) Gustav Agus Irianto dan Wakapolda Papua Brigjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H beserta tamu undangan lainnya.

Wakil Ketua Ombudsman RI Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA dalam sambutannya mengapresiasi Gubernur Papua dan jajarannya yang telah menginisiasi acara ini, sehingga dapat berjalan dengan baik.

"Saya juga menyampaikan selamat kepada jajaran FORKOMPIMDA atas prestasi yang begitu baik dalam mengemban ekonomi masyarakat yang saat ini mengalami peningkatan," ucapnya.

Sebab dengan melihat perkembangan yang positif ini, pihaknya mengajak untuk bersama- sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan pelayanan publik yang berkesinambungan.

"Pada kesempatan ini atas nama pimpinan mengucapkan terimaksih yang sebesar- besarnya kepada pejabat lama yang sudah 2 periode memimpin Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua. Selanjutnya, kepada pejabat yang baru saya yakin dengan pengalaman yang dimiliki bisa melanjutkan pelayanan yang kritis guna peningkatan kinerja, "pesannya.

Diakhir penyampaiannya, Ir. Bobby Hamzar Rafinus mengharapkan dengan terpilihnya Pejabat yang baru kiranya dapat melanjutkan komunikasi ini karena dirinya percaya dengan meningkatnya komunikasi yang tinggi akan menumbuhkan kepercayaan publik kepada Pemerintah Indonesia. (MG)